



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13113-13126

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Desa oleh Combine Resource Institution untuk Penguatan Penerapan Sistem Informasi Desa

Siti Nur Maela<sup>1✉</sup>, Muh. Hanif<sup>2</sup>

UIN SAIZU Purwokerto

Email : [sitinurmaela26@gmail.com](mailto:sitinurmaela26@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembahasan tentang Desa selalu menarik untuk diulas, khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini mencoba untuk mengupas upaya pendampingan desa dengan metode manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Combine Resource Institution. LSM tersebut senantiasa melakukan pendampingan ke desa melalui penerapan sistem informasi desa (SID). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil data melalui aktifitas wawancara secara mendalam dengan salah satu pegiat CRI. Kemudian pengumpulan dokumentasi serta observasi guna memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CRI menggunakan fungsi manajemen dalam melakukan proses pendampingan, dimulai perencanaan melalui kegiatan assessment untuk membuat roadmap kebutuhan pemerintah setempat. Pengorganisasian melalui penyamaan persepsi antar Organisasi Pemerintah Daerah dan melakukan MOU. Pelaksanaan pendampingan melalui seminar, Bimtek, workshop dalam penggunaan SID untuk pendataan secara menyeluruh ditingkat desa. Evaluasi dengan melihat kembali roadmap yang telah disepakati bersama sudah berjalan sejauh mana sekaligus menganalisis faktor penyebab berhasil dan tidak berhasilnya program kemudian dilaporkan kepada pemerintah kabupaten.

Kata Kunci: *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Desa Combine Resource Institution, Sistem Informasi Desa*

Abstract

Discussions about villages are always interesting to review, especially those related to community empowerment. This research tries to examine village assistance efforts using community empowerment management methods carried out by the Combine Resource Institution. This NGO always provides assistance to villages through the implementation of a village information system (SID). This research uses a qualitative descriptive research method, by collecting data through in-depth interviews with one of the CRI activists. Then collect documentation and observations to strengthen the research results. The research results show that CRI uses management functions in carrying out the mentoring process, starting with planning through assessment activities to create a roadmap of local government needs. Organizing through equalizing perceptions between Regional Government Organizations and carrying out MOUs. Implementation of assistance through seminars, technical guidance, workshops in using SID for comprehensive data collection at the village level. Evaluation by reviewing how far the mutually agreed roadmap has progressed, as well as analyzing the factors causing success and failure of the program, then reporting it to the district government

Keyword: *Community Empowerment Management, CombineResource Institution, Village Assistance, Village Information System*

## PENDAHULUAN

Pendampingan desa menjadi alternatif untuk langkah pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan desa. Salah satu yang menjadi alasannya karena desa merupakan suatu entitas masyarakat di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Desa merupakan gambaran nyata wilayah geografis yang lahir dari berbagai unsur seperti kenampakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan budaya yang terhubungan dan saling timbal balik dengan wilayah lain.(Sakban & Sinaga, 2020) Secara resmi dalam periode awal setelah kemerdekaan konsep desa diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian berkembang dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisikan menegaskan kembali kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan terkecil yang memiliki hak otonom dan memiliki hak asal-usul (Lindawaty, 2023). Namun hak otonom yang dimiliki desa, nyatanya masih banyak desa yang menghadapi permasalahan, mulai dari segi kelembagaan seperti tata Kelola administrasi, sumber daya manusia karena minimnya SDM yang ahli bidang IT, serta infrastruktur karena minimnya support dari pembangunan yang ada. (Yanuarsari et al., 2021) Akhirnya hal tersebut berimbas pada tidak efisiennya pelayanan administrasi pada warga, tidak validnya pengolahan data, serta publikasi informasi yang tidak tersedia sehingga pemerintah desa dianggap kurang transparan terhadap informasi yang ada.(Ramadhan, 2024)

Studi tentang pendampingan desa untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan sistem informasi desa (SID), yang mana gagasan tersebut sejalan dengan Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014, bahwa pemerintah kabupaten wajib menyediakan SID untuk penyelenggaraan pemerintah desa, agar data bisa saling terintegrasi dari tingkat bawah hingga pusat. (Parasari et al., 2024) Dan pemerintah daerah maupun pusat juga sudah merespon akan mandat UU diatas dengan menelurkan berbagai kebijakan dan program untuk terealisasinya pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu jalannya pemerintahan desa, seperti program Desa Digital, dengan SID termasuk unsur didalamnya. (Hermawan et al., 2024) Tujuan utama adanya SID ini ialah untuk mendukung pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa secara lebih terukur dan akuntabel. Dengan SID, data dan informasi desa dapat diakses, dianalisis, dimanfaatkan lebih efektif dalam pengambilan Keputusan, dan ini akan memangkas pekerjaan berulang-ulang khususnya terkait pendataan (Julkarnain et al., 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kajian terdahulu untuk menggambarkan proses manajemen pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan desa dengan memanfaatkan SID, mengingat kebijakan dan amanat akan penerapan Sistem Informasi Desa masih belum bisa berjalan dengan optimal karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi mulai dari pemerintah daerah hingga desa (Rasyid & Rahmawati, 2023). Maka salah satu win win solution atas permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pendampingan kepada Desa. Seperti yang dilakukan oleh Combine Resource Institution (CRI), merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya untuk pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat institusi masyarakat desa, komunitas masyarakat, serta keahlian masyarakat di bidang pengelolaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi dan komunikasi. Sejak tahun 2009 CRI telah mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID), dan awal mula embrio adanya SID di Indonesia adalah dari CRI ini, sistem tersebut kemudian dinamai dengan "SID Berdaya" Sebagai bentuk pendataan dalam skala birokrasi, SID dapat dijalankan sebagai "model Public Data Trust" (PDT) yang berfungsi untuk proses tiap tahapan pembangunan.

Berdasarkan penelitian tentang pendampingan atau penerapan sistem informasi desa (SID) ini sudah banyak dilakukan, dan hasil dilapangan mengemukakan bahwasannya penerapan SID menunjukkan hasil yang positif karena desa bisa lebih efisien dalam proses administrasi, penertiban manajemen data dan tata kelola keuangan, serta peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi yang pemerintah desa sediakan. (Hermawan et al., 2024a). Fakta lapangan lainnya dengan adanya SID semua informasi dan potensi desa bisa

di publikasi serta pendataan juga lebih rapi mulai dari data kependudukan, pertanahan, infrastruktur, keuangan desa dan asset-aset yang dapat dikelola dan diperbaharui secara efektif. Sehingga warga jadi lebih mudah mengakses informasi terkini tentang desa dan bisa turut andil dalam pembangunan dan pengelolaan desa (Mardinata et al., 2023). Kemudian adanya SID yang berbasis web juga berefek dalam memudahkan pemerintah Desa ataupun warga untuk mengakses informasi di mana saja. Hal tersebut menimbulkan peningkatan motivasi para pemerintah desa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Abdi et al., 2020).

Kajian ini didasarkan pada argumentasi bahwa dalam konteks pendampingan desa, teori pemberdayaan masyarakat sangat relevan karena Combine Resource Institution selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan pendampingan yaitu untuk memberdayakan desa-desa melalui proses implementasi sistem informasi desa. Sehingga agar pendampingan berjalan dengan baik maka diperlukan manajemen pemberdayaan yang rapi dan terstruktur sehingga tercipta kemandirian, peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berbasis data. Alasan kuat lainnya terkait dengan dorongan implementasi SID antara lain : 1) Sistem Informasi Desa (SID) ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat yang mesti dilakukan pemerintahan pada level desa seperti yang tertera pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2) Manfaat positif dan transformasi tata kelola pemerintah desa menjadi lebih baik dengan adanya SID karena lebih mempermudah kinerja mereka dalam melakukan pelayanan atau pendataan. 3) Program penerapan SID ini sudah mulai masif dilakukan baik itu inisiatif dari desanya sendiri atau kebijakan persuasif dari pemerintah ditingkat pusat atau Kabupaten, namun tantangan kedepannya adalah penerapan yang berkelanjutan agar SID ini bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu dibutuhkan namanya pendampingan yang berkala.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif, menurut muhajir dalam Anggrayni pada pendekatan kualitatif biasanya akan menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis, yang diperoleh dari data lisan atau perilaku yang telah diamati, pada penelitian model ini menekankan proses dibandingkan hasil dari objek penelitian (Anggrayni, 2022), selain itu juga dilakukan dengan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial yang muncul (Setiyowati, 2021). Penelitian kualitatif ini melibatkan salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu Combine Resource Institution (CRI) sebagai representasi dari tema tulisan yang diambil yaitu ingin mengupas bagaimana manajemen

yang dilakukan dalam proses manajemen pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan desa oleh CRI dalam meningkatkan penerapan sistem informasi desa. Mengingat CRI ini menjadi salah satu penggerak ide besar dari lahirnya sistem informasi desa (SID), oleh karena itu penulis memilih CRI untuk bisa memberikan rangkaian manajemen yang telah dan selalau dilakukan dalam pendampingan desa.

Penelitian tentang manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan desa melalui penerapan SID ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dikenal juga dengan sebagai data utama yaitu data yang langsung diperoleh dari responden (Hendra et al., 2023). Dalam hal ini data primer terdiri dari salah satu pegiat CRI yaitu Manajer (Unit Manajemen Program dan Inovasi), responden tersebut menjadi sumber utama informasi penelitian. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, data ini berasal dari informasi tambahan dari pegiat CRI Ketika berkomunikasi tanpa adanya wawancara khusus serta beberapa dokumen yang bisa diakses dan didapat.

Proses pengumpulan data digunakan panduan observasi serta wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini kemudian disesuaikan dengan variable yang ada pada penelitian yaitu mencoba menggali informasi tentang sistem manajemen yang dulu dan sekarang dilakukan dalam pemberdayaan serta pendampingan yang dilakukan di desa. Selain itu dalam penggalian informasi ini pertanyaan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan saat wawancara berlangsung agar bisa diperolehnya data yang komprehensif.

Penelitian dilakukan mulai dengan proses penyiapan instrumen penelitian sesuai dengan penjabaran masalah dan pertanyaan dalam penelitian. Kemudian data primer serta sekunder dikumpulkan, setelah itu data-data dikaji secara kualitatif untuk dianalisis yang dapat diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap permasalahan (Suryati et al., 2023). Sehingga urutan prosesnya dimulai dari data dikumpulkan, kemudian reduksi data, diteruskan dengan penyajian data, dan terakhir penarikan Kesimpulan.

Seperti pada umumnya penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Mahpudin, 2022). Observasi dilakukan secara langsung ke kantor CRI melihat serta mendokumentasikan kegiatan yang ada, serta pengamat tempat kantor atau sekretariat untuk menggali informasi. Selain itu metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh data primer yaitu dengan wawancara secara mendalam dengan Manajer (Unit Manajemen Program dan Inovasi) di CRI yaitu Ferdhi F.Putra. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber lainnya dalam melengkapi hasil penelitian seperti mengakses informasi via website dan juga hasil laporan dari kegiatan CRI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah metode yang dilakukan melalui kerja-kerja sosial yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain menerangkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha memampukan mengembangkan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat terhadap tekanan dari segala bidang dan sektor dalam kehidupan (Harahap, 2020) Sehingga secara sederhananya tujuan pemberdayaan yaitu untuk mendorong kemandirian mereka dengan menyediakan alat-alat yang mereka butuhkan (Alfiansyah, 2023). Proses pemberdayaan hampir selalu diikuti dengan proses pendampingan, proses pendampingan masyarakat khususnya di desa sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk membantu meningkatkan kemandirian desa. Pendampingan desa melibatkan beberapa langkah, dimulai proses perencanaan pendampingan melalui tahapan mengidentifikasi kebutuhan, pelaksanaan dalam penyelenggaraan program pendampingan, serta proses evaluasi untuk menilai dan mengukur keberhasilan program (Sugiana et al., 2020). Adanya Pendampingan Desa memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat pedesaan yang sejahtera, dalam upaya percepatan pembangunan. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran dari diri masyarakat dalam melakukan pembangunan secara partisipatif untuk tercapainya kemajuan desa (Laha & Dorohungi, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggali informasi tentang bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan desa yang dilakukan combine resource institution, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil yang ditemukan ke dalam beberapa sub bab yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya.

### Manajemen Terstruktur dalam Setiap Pemberdayaan dan Pendampingan Desa

Kegiatan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat desa sudah membawa transformasi dalam peningkatan kemandirian serta kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami dan dihadapinya, khususnya tentang tata kelola pemerintah desa yang belum begitu terstruktur rapi dalam memberikan pelayanan warga, serta hal terpenting perapian pendataan yang masih menjadi PR bersama sebab segala pendataan selalu bertumpu pada Desa. Oleh karena itu Combine Resource Institution melakukan pemberdayaan dan pendampingan desa dalam penerapan sistem informasi desa guna

menjawab segala permasalahan yang muncul di desa khususnya dalam pelayanan dan pendataan. Dan dari hasil lapangan di temukan informasi bahwa CRI melakukan pendampingan dalam skala makro yaitu menysasar langsung desa-desa di satu kabupaten tertentu. Berikut beberapa langkah manajemen yang dilakukan oleh CRI yang peneliti adopsi berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di analisis dan diolah sebelumnya.

- a. Perencanaan pemberdayaan dan pendampingan desa yang dilakukan oleh CRI selalu diawali dengan penyesuaian program yang mereka dapatkan dari fundrising atau pendonor sebagai contoh ada program pengentasan kemiskinan eskترم desa, maka CRI akan melakukan kunjungan ke pemeritah kabupaten setempat untuk pelaksanaan kegiatan assessment awal dalam rangka penyamaan persepsi dengan pemkab agar mencapai tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan program kabupaten yang nantinya akan di sinkronasi datanya untuk program yang ditawarkan juga oleh CRI yaitu penerapan sistem informasi desa. Sehingga pada perencanaan ini CRI membuat assessment agar pendampingan dalam penerapan SID ini bisa lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan agenda dari pemerintah kabupaten untuk program-program yang akan melibatkan seluruh desa dalam kabupaten tersebut. Maka proses perencanaan ini lebih memfokuskan pada segi komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh CRI untuk kemudian bisa mencapai apa yang sudah direncanakan.
- b. Pengorganisasian dalam pemberdayaan dan pendampingan desa melalui penerapan SID. setelah melalui proses perencanaan melalui kegiatan assessment, kemudian CRI melakukan follow up, tahap pengorganisasian menjadi hal yang penting untuk pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. CRI melakukan pengorganisasian dengan menyamakan persepsi secara lebih meluas dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari pemerintah kabupaten, serta dinas-dinas terkait seperti Kominfo, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan perwakilan pemerintah desa. Dalam agenda tersebut selain untuk mengharmonisasikan pemahaman bersama juga untuk membuat roadmap atau peta jalan yang akan dilakukan selama kurun berapa tahun untuk menunjang tercapainya program dan kebutuhan daerah. Kemudian sebagai penguat kerjasama tersebut dilakukan pembuatan nota kesepemahaman atau MOU yang disepakati bersama dengan pemerintah kabupaten serta OPD kabupaten setempat. Secara sederhananya pengorganisasian yang dilakukan oleh CRI adalah melauai berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dengan penandatanganan MOU yang dilakukan selama 3 tahun agar program yang direncanakan bisa berjalan lebih teratur dan memberi manfaat yang baik.

- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan pendampingan dilakukan dengan implementasi program apa yang sudah disepakati, pelaksanaan pendampingan diperkuat dengan pembuatan kegiatan seperti pada umumnya yaitu melakukan pelatihan, bimtek atau workshop yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten serta dihadiri oleh semua pemerintah desa dan para OPD. Forum tersebut untuk memberikan pemahaman akan program yang akan dilaksanakan juga memberi pengetahuan dan praktek pada penggunaan sistem informasi desa untuk dimanfaatkan dalam pendataan secara menyeluruh ditingkat level desa. Pendataan Tingkat desa dilakukan dengan latar belakang hampir semua program bertumpunya pada pendataan di desa mulai dari pengentasan kemiskinan, distribusi bansos hingga pencegahan stunting. Desa selalu menjadi tumpuan utama pendataan dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga agar data bisa benar-benar valid diperlukan alat untuk membantu mempermudah pendataan yaitu sistem informasi desa. Usai dari bimtek atau workshop yang dilakukan pendampingan lanjutan yang dilakukan ialah CRI senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan selalu mengingatkan agar Pemkab aktif mendorong desa melakukan pendataan, sehingga data yang sudah terkolektif pada sistem bisa untuk digunakan juga dalam aktifitas tugas dan pekerjaan sehari-hari. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka desa akan auto pilot sehingga pendampingan Tingkat lanjutan CRI hanya sekedar mengingatkan roadmap program dan membantu jika ada kendala pada sistem atau semisal Desa memiliki program internal semisal pembuatan modul stunting maka CRI akan memberikan pendampingan yang lebih intens.
- d. Evaluasi manajemen pemberdayaan dan pendampingan desa dalam penerapan SID oleh CRI ini ditujukan untuk melihat sejauh mana perencanaan awal bisa tercapai atau tidak. Hal yang dilakukan oleh CRI dalam proses evaluasi setiap pendampingan yang dilakukan adalah dengan cara melihat kembali roadmap yang disusun diawal dan disepakati dalam MOU. Sehingga Ketika program sudah berjalan 3 tahun dicek Kembali list-list program mana saja yang tercapai dan tidak, kemudian di analisis faktor penyebabnya apa, setelah itu CRI melaporkan kepada Pemkab dan dinas terkait kaitannya progress apa saja yang sudah dan belum tercapai, sembari dalam waktu berkala selalu mengingatkan progress kegiatan yang belum berlangsung. Apabila factor penyebab belum tercapainya program sudah ditemukan maka yang akan dilakukan oleh CRI adalah seperti diawal yaitu melakukan assessment dan follow up berlanjut.

#### Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Desa Lebih Berdaya

Combine Resource Institute (CRI) telah lebih dari 10 tahun melakukan

pendampingan dengan penerapan SID. Dari berbagai pengalaman tersebut sudah banyak desa-desa yang mulai mandiri serta memiliki daya saing, sebagai contoh salah satu dampingan CRI yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Desa Nglegi dalam satu kasus saat pembagian bantuan sosial, desa mendapatkan data dari pusat, namun karena data tersebut tidak valid yang mana harusnya warga mendapat bantuan akan tetapi tidak terdaftar dan warga yang mampu ternyata terdaftar. Akhirnya desa nglegi mengajukan protes data ke Tingkat kecamatan sebab datanya tidak valid, namun karena data dari pusat maka secara umum data tersebut yang harus dipakai, akan tetapi karena Desa nglegi tetap bersikukuh akhirnya pemerintah kecamatan memberikan kelonggaran jika ada data bandingan yang lebih valid maka desa dipersilahkan menggunakan data yang mereka punya. Karena desa nglegi telah memiliki SID yang didalamnya juga terdapat data kependudukan dimana data-data warga sudah terklasifikasi secara valid maka mereka menggunakan data yang dimiliki oleh Desa sehingga bantuan sosial tersebut lebih tepat sasaran. Sehingga sesuai dengan teori tentang pemberdayaan masyarakat CRI berfokus pada memberikan pengetahuan dan pemahaman, memfasilitasi sebuah alat yaitu SID serta melatih untuk melakukan perubahan pelayanan manual ke digital menerapkan SID untuk pelayanan (Muhlin & Yasa, 2019) Sehingga dari pendampingan yang dilakukan tersebut menjadi bekal untuk desa lebih berdaya serta mandiri dimasa yang akan datang (Thohir, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen yang terstruktur dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan oleh Combine Resource Institution untuk meningkatkan penerapan sistem informasi desa terbukti adanya. Hal tersebut dikarenakan strategi pendampingan yang dilakukan oleh CRI sering kali dilakukan secara massif yaitu dengan berkoordinasi langsung bersama pemerintah kabupaten serta OPD terkait, sehingga penerapan SID dan pembangunan daerah ini bisa dilakukan secara meluas karena instruksinya berupa *top down* dari pemerintah daerah langsung ke bawah ke desa-desa. Maka pemberdayaan yang dilakukan juga bisa lebih efektif, selain karena alat yang ditawarkan berupa alat digital berupa sistem informasi yang mana lebih efisien dalam penerapan dan juga penggunaan, kemudian implementasi penggunaan pada SID ini sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kinerja para pemerintah desa dalam kesehariannya.

Adanya pemberdayaan masyarakat dengan penerapan SID ini direspon positif, terbukti dengan dampingan CRI sebanyak lima kabupaten yang masih eksis hingga saat ini, dan juga SID ini sudah banyak dikembangkan pula oleh provider atau instansi lain. Hal tersebut menyadarkan bahwasannya desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri serta berdaya sesuai dengan potensi khasnya, perlu dorongan serta stimulasi untuk menggerakkan

organisasinya agar memaksimalkan potensi yang ada, maka diperlukan adanya pendampingan baik dari pemerintah pusat dan daerah yang mana sejatinya ini sudah terealisasi dengan adanya program dari pemerintah seperti pendamping PKH dari program Kementerian Sosial serta PLD dari program Kementerian Desa PDTT. Dan tak kalah penting pendampingan dari pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat salah satunya Combine Resource Institution (CRI), yang mana hal tersebut membawa angin segar bagi desa untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia yang ada.

Pemberdayaan masyarakat kini menemui masa populernya, selain karena sudah dirancang oleh kementerian dengan adanya pendamping-pendamping desa, juga pemberdayaan yang dilakukan pihak ketiga yaitu dari pihak di luar pemerintah, memiliki keunggulan bersifat lebih intens sebab pendekatannya diawali dari upaya memberdayakan untuk proses pembangunan dan perubahan. Ketika ditanyakan apa indikator keberhasilan dalam pemerdayaan dan pendampingan desa, CRI memiliki prinsip bahwa ketika sistem yang ditawarkan ke desa bisa berjalan secara berkelanjutan dan dipakai untuk alat bantu dalam kinerja keseharian pemerintah khususnya pemdes maka sudah dikatakan berhasil dari semua tahapan-tahapan dalam pemberdayaan dan pendampingan, sebab ciri dari keberhasilan pendampingan desa yaitu mampu membangun kemandirian mereka dengan menyediakan alat-alat dan keperluan yang mereka butuhkan.

Pembeda pada penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa perlu adanya manajemen terstruktur dan bersifat makro dalam melakukan pemberdayaan serta pendampingan desa, sebagai contoh langkah dan strategi yang dilakukan oleh Combine Resource Institution, mereka melakukan kegiatan pendampingan langsung menasar pada skala besar yaitu desa-desa dalam satu kabupaten hal tersebut dipilih dalam rangka membangun integrasi data, sehingga sistem informasi ini bisa terintegrasi dengan mekanisme sistem para desa-desa. Agar kemudian pemerintah kabupaten juga bisa mendapatkan benefit dari mobilisasi pendataan yang ada di desa karena harapannya desa bisa memiliki data yang bagus dan data yang akurat maka Kabupaten akan mendapatkan manfaatnya khususnya dalam pembangunan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwasannya sistem informasi desa yang awal mula digagas pertama kali tahun 2009 di CRI ini saat ini sudah mulai dikembangkan oleh pihak-pihak lain. Yang mana artinya ide ini banyak diterima oleh berbagai pihak, namun yang menjadi tantangan saat ini adalah dengan adanya sistem informasi desa yang dibuat dan dibangun oleh pihak lain dan juga sudah diterapkan oleh banyak desa karena memang penerapan SID ini sudah diatur dalam Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU Desa menyatakan bahwa "Sistem Informasi Desa ini meliputi data desa, data

pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan". Sehingga perlu ada pemahaman bersama untuk mewujudkan Indonesia satu data perlu ada prinsip interoperabilitas antar satu sama lain penyedia sistem informasi desa, sehingga apabila berbeda developer namun masih bisa untuk bertukar data secara aman dan otomatis. Sehingga pembangunan berbasis data dan menuju integrasi data tidak hanya Tingkat kabupaten saja namun harapannya bisa naik terwujud Tingkat provinsi bahkan Tingkat nasional

## SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, combine resource institution (CRI) melakukan pemberdayaan dan pendampingan dengan menerapkan fungsi manajemen mulai perencanaan hingga evaluasi. Serta poin penting dalam penelitian ini adalah pendampingan desa dalam penerapan SID ini bisa berjalan dengan massif dikarenakan strategi yang dilakukan oleh CRI yaitu gerakan secara meluas langsung menysasar desa-desa di satu kabupaten dengan komunikasi dan koordinasi langsung di jajaran pemerintah kabupaten.

Pemberdayaan dalam penggunaan SID telah memungkinkan penelitian memahami bahwasannya SID ini sejatinya menjadi alat yang bisa membantu kinerja dari pemerintah desa sehingga untuk mengjangkau terlaksananya program secara tepat guna harus ada data yang benar-benar valid dan hal tersebut bisa diwujudkan dengan memanfaatkan kegunaan dari sistem informasi desa dalam hal ini sebagai fungsi pengolahan data kependudukan terpadu yang ada di desa. Dari jalannya penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari masih ada kekurangan yang terdapat didalamnya, oleh karena itu studi lanjutan yang perlu adanya penelitian secara kuantitatif dari tema penelitian ini khususnya implementasi kebermafaatan dai sistem informasi desa yang sudah banyak diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, J. K., Fitri, L. E., Setiawan, D., Eko, P., Utomo, P., & Bhayangkari, S. K. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa*. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/11568/10414>
- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41–51.  
<https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Anggrayni, I. (2022). MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM INOVASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI PADA APLIKASI TANGGAP KARAWANG ATAU TANGKAR). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 10–17. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2458>
- Harahap, M. E. U. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880>
- Hermawan, E., Panjaitan, H., Listiorini, D., & Kunci, K. (2024). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN DESA: STUDI KASUS PADA DESA X OPTIMIZING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING VILLAGE MANAGEMENT EFFICIENCY: CASE STUDY IN VILLAGE INFO ARTIKEL ABSTRAK*.
- Julkarnain, M., Made Widiarta, I., Akhir Putra, J., Sasmita Susanto, E., Mulyanto, Y., Hamdani, F., Esabella, S., Dery Sofya, N., Idifitriani, F., & Ismiyarti, W. (2023). SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DESA (OPEN SID) DALAM MENUNJANG PELAYANAN MASYARAKAT PADA DESA MARGA KARYA. *Jurnal Pengabdian Rekayasa Sistem*, 1(2).
- Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 1(1), 27–36.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Mahpudin, P. (2022). MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah: The Indonesian*, 10, 35–46.
- Mardinata, E., Dwi Cahyono, T., Muhammad Rizqi, R., Studi Bisnis Digital, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Teknologi Sumbawa, U., Studi Akuntansi, P., & Author Tomy Dwi Cahyono, C. (2023). PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat History Artikel. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 73–81. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>.

- Muhlin, & Yasa, I. W. S. (2019). MODEL PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI. *Jurnal Ideas Publishing*, 5(1), 39–54.
- Parasari, N. S. M., Purnama, A., & Maheswari, A. I. A. (2024). Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Desa Pitra Tabanan. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v7i1.2657>
- Ramadhan, F. S. R. (2024). Manajemen Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Persis Lempong – Garut). *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2 (1).
- Rasyid, H. A. N., & Rahmawati, D. E. (2023). Pengelolaan Website Desa untuk Optimalisasi Data Potensi Desa dalam Sistem Informasi Desa (SID). *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v4i1.497>
- Sakban, M., & Sinaga, R. (2020). Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Tanjung Maraja Kab. Simalungun). *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 4(2).
- Setiyowati, Y. (2021). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan*. 3, 331–362. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp>
- Sugiana, F. S., Ardiwinata, S., & Pramudia, J. R. (2020). PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 2(2).
- Suryati, L., Giatman, Hasan Maksum, & Sri Rahmadhani. (2023). Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Menghadapi Era Revolusi 4.0. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 632–642. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i3.56703>
- Thohir, U. F. (2022). PENDAMPINGAN TRANSFORMASI METODE PEMASARAN UMKM DESA CRABAK DARI TRADISIONAL KE DIGITAL. In *Indonesian Engagement Journal* (Vol. 3, Issue 2). <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-crabak.html>.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307–6317. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>